

**IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN MELALUI PROGRAM REHABILITASI SOSIAL RUMAH TIDAK LAYAK HUNI (RS-RTLH) DI DESA HARUSAN TELAGA KECAMATAN AMUNTAI SELATAN KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA**

**Mahrini**

Universitas Sapta Mandiri

Email: [mahrini260690@gmail.com](mailto:mahrini260690@gmail.com)

INFO ARTIKEL

**Riwayat Artikel:**

Received : 20-03-2025

Revised : 04-04-2025

Accepted : 10-04-2025

**Keywords:** Implementation, rehabilitation, Social housing uninhabitable (rs-rtlh)

**DOI:** <https://doi.org/10.62335>

**ABSTRACT**

*The results of the study: First, from the sub-variables of the size and objectives of the policy with realistic indicators, it is in accordance with the conditions of the community and the ideal indicators are in accordance. While Second, from the sub-variable of resources with the indicator of ability hampered by the lack of employees, then, the financial indicator is not sufficient and the implementation time indicator is also in accordance with the target. Third, from the sub-variable of the characteristics of the implementing agent for the formal organizational indicator involved in the RS-RTLH program, namely the Sub-district, Village and Perkim-LH Service, the informal organizational indicator is not present in this implementation activity. Fourth, from the sub-variable of the attitude of the tendency of the implementers for the indicator of the attitude of acceptance from the community which is very good and the indicator of the absence of rejection from the community towards the RS-RTLH program. Fifth, from the sub-variable of communication between the organization and the implementing activities from the communication coordination indicator has been running well; and Sixth, from the sub-variable of the economic, social and political environment, it has a very big impact.*

**ABSTRAK**

Hasil dari penelitian tersebut: Pertama, dari sub variabel ukuran dan tujuan kebijakan dengan indikator realistik ini sudah sesuai dengan kondisi masyarakat dan indikator ideal yang sudah sesuai

dengan kondisi yang ditentukan. Sedangkan Kedua, dari sub variabel sumber daya dengan indikator kemampuan terhambat oleh kurangnya jumlah Pegawai, kemudian, indikator finansial belum mencukupi serta indikator waktu pelaksanaan juga sudah sesuai dengan target. Ketiga, dari sub variabel kareakteristik agen pelaksana untuk indikator organisasi formal yang terlibat dalam program RS-RTLH ini yaitu pihak Kecamatan, desa dan Dinas Perkim-LH, indikator organisasi informal yang tidak ada dalam kegiatan implementasi ini. Keempat, dari sub variabel sikap kecenderungan para pelaksana untuk indikator sikap penerimaan dari masyarakat yang sangat baik dan indikator tidak adanya sikap penolakan dari masyarakat terhadap program RS-RTLH. Kelima, dari sub variabel komunikasi antara organisasi dan aktivitas pelaksana dari indikator koordinasi komunikasi sudah berjalan dengan baik; dan Keenam, dari sub variabel lingkungan ekonomi, sosial dan politik sangat berdampak.

## PENDAHULUAN

Kemiskinan telah membuat jutaan rakyat tidak bisa mengenyam pendidikan yang berkualitas, kesulitan membiayai kesehatan, kurangnya tabungan dan tidak ada investasi, kurangnya akses ke pelayanan publik, kurangnya lapangan pekerjaan, kurangnya jaminan sosial dan perlindungan terhadap keluarga miskin, menguatnya arus imigrasi ke kota dan yang lebih parah kemiskinan menyebabkan jutaan rakyat memenuhi kebutuhan pangan, sandang dan papan secara terbatas. Kemiskinan telah membatasi hak rakyat untuk mendapatkan pendidikan yang layak, kesehatan yang terjamin, mendapatkan pekerjaan yang layak dan kemiskinan menjadi alasan yang sempurna rendahnya *Human Development Index* (HDI) Pembangunan Manusia Indonesia.

Masalah kemiskinan sudah menjadi masalah pokok dan menjadi ancaman bagi suatu negara, sehingga perlu adanya penyelesaian untuk masalah tersebut dan permasalahan kemiskinan tidak hanya terjadi pada negara berkembang namun juga terjadi di negara maju, pastinya dengan jumlah dan tingkat kemiskinan yang berbeda-beda.

Indonesia sebagai salah satu negara berkembang memiliki persoalan kemiskinan yang belum terselesaikan dan menjadi permasalahan serius yang harus segera untuk diselesaikan oleh pemerintah. Menurunkan angka kemiskinan merupakan salah satu tujuan dari pembangunan nasional yakni meningkatkan kinerja perikonomian masyarakat untuk menciptakan lapangan pekerjaan dan menata kehidupan yang baik bagi masyarakat serta sebagaimana yang telah diamanatkan oleh konsitusi Indonesia dalam mensejahterakan rakyatnya yang tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, yakni melindungi segenap bangsa indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan sosial.

Sebagai upaya percepatan penanggulangan kemiskinan, sejak 2007 Pemerintah Indonesia telah mengklaim melaksanakan Program Bantuan Tunai dan non tunai yang dikenal dengan nama Program Bantuan Rumah Tidak Layak Huni (RS-RTLH) tersebut. Bantuan dana RS-RTLH yang diberikan berorientasi kepada kemampuan untuk memenuhi kewajibannya dibidang sosial dan kesehatan.

Berdasarkan data teknis perumahan dan kawasan permukiman tahun 2020, diketahui bahwa total jumlah rumah yang ada di Kecamatan Amuntai Selatan terdiri dari 7.767 buah rumah dengan total jumlah rumah tidak layak huni (RTLH)/ yang perlu diperbaiki/ direhap sebanyak 522 buah rumah, sedangkan untuk desa Harusan Telaga total jumlah rumah pada tahun 2020 berjumlah 175 buah, dengan total jumlah rumah tidak layak huni (RTLH) rumah yang perlu diperbaikiki/ rehap sebanyak 40 buah.

Sedangkan dari data rumah tidak layak huni Nomor 401/11/HT-AS di desa Harusan Telaga ini terdapat 15 buah rumah yang mendapatkan bantuan program RS-RTLH yang diambil dari data 40 buah rumah yang diajukan untuk diperbaiki. Adapun para penerima manfaat dari program RS-RTLH yang ada di desa Harusan Telaga berjumlah 15 orang.

Sedangkan fenomena masalah yang timbul dalam implementasi RS-RTLH dari Dinas Perkim Kabupaten Hulu Sungai Utara adalah:

1. Dilihat dari sisi sumberdaya masih kurang
2. Target dari program RS-RTLH belum tepat sasaran, program pendataan RS-RTLH.
3. Sosialisasi mengenai program RS-RTLH belum berjalan optimal.

Dari penjalasan permasalahan tersebut, penulis berkeinginan untuk melakukan penelitian dan penulisan skripsi lebih lanjut terkait persoalan tersebut dengan judul "Implementasi Kebijakan Penanggulangan Kemiskinan melalui Program Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni (RS-RTLH) di Desa Harusan Telaga Kecamatan Amuntai Selatan Kabupaten Hulu Sungai Utara.

## **METODE PENELITIAN**

### **A. Lokasi Penelitian**

Penelitian ini dilaksanakan di Desa Harusan Telaga Kecamatan Amuntai Selatan Kabupaten Hulu Sungai Utara, Kantor Kecamatan Amuntai Selatan serta di Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Hulu Sungai Utara.

### **B. Pendekatan Penelitian**

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yaitu metode penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi objek alamiah.

### **C. Tipe Penelitian**

Tipe penelitian yang digunakan adalah diskriptif kualitatif yaitu penelitian yang menjelaskan sesuatu yang menjadi sasaran penelitian secara mendalam.

### **D. Data dan Sumber Data**

1. Data meliputi :
  - a. Data Primer
  - b. Data Sekunder

## 2. Sumber Data

Sumber data dipilih secara purposive sampling yaitu teknik pengambilan sampel sumber data dengan pertimbangan tertentu.

## E. Desain Operasional Penelitian

Definisi Operasional adalah unsur penelitian yang memberitahukan bagaimana caranya suatu variabel atau suatu informasi ilmiah yang membantu peneliti lain yang ingin menggunakan variabel yang sama.

## F. Teknik Pengumpulan Data

1. Observasi
2. Wawancara
3. Dokumentasi

## G. Teknik Analisa Data

1. Reduksi Data
2. Penyajian Data
3. Penarikan Kesimpulan

## H. Uji Kredibilitas data

1. Perpanjangan Pengamatan
2. Meningkatkan Ketekunan
3. Triangulasi
4. Analisis Kasus Negatif
5. Menggunakan Bahan Referansi
6. Mengadakan membercheck

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### 1. Implementasi Kebijakan Penanggulangan Kemiskinan melalui RS-RTLH di Desa Harusan Telaga Kecamatan Amuntai Selatan Kabupaten Hulu Sungai Utara

#### a. Ukuran dan tujuan kebijakan

##### 1. Realistis

Realistis maksudnya bersifat nyata atau bersifat wajar, dimana seseorang tidak selalu memikirkan sesuatu terlalu tinggi, tetapi semampunya. Dari hasil wawancara, observasi dan dokumentasi dapat disimpulkan bahwa program RS-RTLH ini merupakan kebijakan yang realistis yang mampu membantu masyarakat dalam masalah tempat tinggal mereka yang sudah tidak layak huni.

##### 2. Ideal

Ideal adalah sangat sesuai dengan yang dicita-citakan atau dikehendaki oleh masyarakat penerima manfaat. Berdasarkan hasil wawancara, observasi dan dokumentasi dapat disimpulkan bahwa program bantuan RS-RTLH ini merupakan kebijakan Pemerintah yang sangat ideal bagi masyarakat miskin yang sangat mengharapkan hunian yang layak untuk ditempati.

#### b. Sumberdaya

##### 1. Kemampuan

Keberhasilan implementasi kebijakan sangat tergantung dari kemampuan memanfaatkan sumber daya yang tersedia. Manusia merupakan sumber daya

yang terpenting dalam menentukan keberhasilan suatu implementasi kebijakan. Berdasarkan hasil wawancara, observasi dan dokumentasi dapat disimpulkan bahwa kemampuan sumber daya manusia dalam hal pelaksanaan implementasi kebijakan ini terkendala oleh kurangnya jumlah personil dan lemahnya pengawasan yang dilakukan oleh pihak pelaksana.

## **2. Finansial**

Sumber daya non manusia tidak kalah pentingnya dengan sumber daya manusia. Sumber daya kebijakan ini harus juga tersedia dalam rangka untuk memperlancar administrasi implementasi suatu kebijakan. Sumber daya ini terdiri atas dana atau insentif lain yang dapat memperlancar pelaksanaan (implementasi) suatu kebijakan. Kurangnya atau terbatasnya dana atau insentif lain dalam implementasi kebijakan, adalah merupakan sumbangan besar terhadap gagalnya implementasi kebijakan. Berdasarkan hasil wawancara dan observasi dapat disimpulkan bahwa sumber daya finansial dalam kegiatan program RS-RTLh ini belum mencukupi.

## **3. Waktu**

Dalam pelaksanaan RS-RTLH tentunya memiliki jangka waktu dalam penyelesaiannya yaitu dalam kurun waktu satu tahun anggaran. Berdasarkan hasil wawancara dan observasi dapat disimpulkan bahwa dalam kegiatan pelaksanaan program bantuan RS-RTLH ini jangka waktu yang diperlukan selama 1 tahun anggaran dan sudah mencukupi dalam hal pelaksanaannya.

### **c. Karakteristik agen pelaksana**

#### **1. Organisasi formal**

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi dapat disimpulkan bahwa dalam kegiatan pengimplementasian program RS-RTLH terdapat beberapa organisasi formal yang terlibat seperti pihak Dinas Perkim-LH, Kecamatan dan Desa, untuk pihak Dinas Perkim bertugas untuk melakukan pembinaan, koordinasi, monitoring dan evaluasi dalam kegiatan RS-RTLH, pihak Kecamatan bertugas untuk menampung data rumah tidak layak huni yang diberikan oleh pihak desa yang kemudian diajukan kepada pihak Dinas Perkim-LH, sedangkan pihak desa bertugas untuk mendata warganya yang memang berhak untuk mendapat program RS-RTLH.

#### **2. Organisasi informal**

Organisasi informal yaitu kumpulan dari dua orang atau lebih yang terlibat dalam suatu aktifitas serta tujuan bersama yang tidak disadari. Berdasarkan hasil wawancara dan observasi dapat disimpulkan bahwa dalam kegiatan pengimplementasian program bantuan RS-RTLH tidak terdapat keterlibatan organisasi informal.

### **d. Sikap / kecenderungan para pelaksana**

#### **1. Sikap penerimaan terhadap kebijakan**

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi dapat disimpulkan bahwa dalam kegiatan pengimplementasian program bantuan RS-RTLH ini sudah sangat diterima oleh masyarakat tetapi masih terkendala oleh kurangnya

sosialisasi yang dilakukan oleh Dinas Perkim-LH yang tidak pernah terjun langsung ke desa untuk melakukan sosialisasi.

## **2. Sikap penolakan terhadap kebijakan**

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi dapat disimpulkan bahwa dalam kegiatan pengimplementasian program bantuan RS-RTLH ini tidak terjadi penolakan dari pihak KPM karena mereka sangat senang tempat hunian mereka direnovasi secara gratis.

## **e. Komunikasi antar organisasi dan aktivitas pelaksana**

### **1. Koordinasi komunikasi**

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi dapat disimpulkan koordinasi komunikasi yang dilakukan oleh pihak Dinas Perkim masih kurang dikarenakan banyak masyarakat yang kurang memahami tentang proses pelaksanaan program RS-RTLH ini, dikarenakan untuk koordinasi Dinas Perkim-LH dengan pihak Kecamatan dalam hal melakukan pembinaan program, untuk tingkat evaluasi masih rendah, kemudian untuk koordinasi dengan pihak desa dalam hal data penerima manfaat yang diberikan oleh pihak desa masih kurang dalam hal monitoringnya.

## **f. Lingkungan ekonomi, sosial dan politik**

### **1. Lingkungan ekonomi**

Lingkungan ekonomi merupakan kondisi ekonomi di tempat kebijakan tersebut diimplementasikan, dimana kondisi ekonomi ini memiliki dampak yang kuat terhadap kinerja dari setiap pengimplementasian kebijakan. Berdasarkan hasil wawancara dan observasi dapat disimpulkan lingkungan ekonomi sangat mempengaruhi tingkat keberhasilan implementasi program bantuan RS-RTLH.

### **2. Lingkungan sosial**

Lingkungan sosial merupakan interaksi diantara masyarakat dengan lingkungan ataupun lingkungan yang juga terdiri dari makhluk sosial atau manusia. Lingkungan sosial ini yang kemudian membentuk suatu sistem pergaulan yang memiliki peran besar didalam membentuk sebuah kepribadian seseorang dan kemudian terjadilah sebuah interaksi diantara orang atau juga masyarakat dengan lingkungannya. Berdasarkan hasil wawancara dan observasi dapat disimpulkan lingkungan sosial sangat mempengaruhi tingkat keberhasilan implementasi program bantuan RS-RTLH.

### **3. Lingkungan politik**

Lingkungan politik mengacu pada faktor-faktor yang berkenaan dengan pemerintahan atau urusan publik yang mempengaruhi baik Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah dan Lembaga-Lembaga Pemerintahan lainnya. Berdasarkan hasil wawancara dan observasi dapat disimpulkan lingkungan politik mempengaruhi tingkat keberhasilan implementasi program bantuan RS-RTLH.

## 2. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi

### a. Faktor Pendukung

1. Tingkat Realisasi Kebijakan.
2. Pembangunan Nasional pada Bidang Perumahan dan Pemukiman.
3. Target Tercapainya Pelaksanaan .
4. Tingkat Kesiediaan Masyarakat.
5. Memperbaiki Kondisi Tempat Tinggal Masyarakat.
6. Upaya-Upaya Pertemuan.
7. Pembagian Tugas.
8. Masyarakat Ikut Membantu.
9. Dukungan dari Pihak DPRD.

### b. Faktor Penghambat

1. Kurangnya Jumlah Sumber Daya Manusia.
2. Dana yang Tidak Mencukupi.
3. Tidak Adanya Keterlibatan Organisasi Informal.
4. Tingkat Pendapatan Masyarakat Umumnya Rendah.

### 3. Upaya-Upaya yang Dilakukan

- a. Mengajukan Proposal untuk Penambahan Jumlah Pegawai.
- b. Mengajukan Penambahan Dana.
- c. Mengikuti Sertakan Organisasi Informal.
- d. Melakukan Pelatihan Keterampilan Usaha Ekonomi.

## KESIMPULAN

1. *Pertama*, dari sub variabel ukuran dan tujuan kebijakan dengan indikator realistik ini sudah sesuai dengan kondisi masyarakat setempat, dan indikator ideal yang sudah sesuai dengan kondisi rumah layak huni yang ditentukan oleh peraturan Pemerintah tentang RS-RTLH. Sedangkan *Kedua*, dari sub variabel sumber daya dengan indikator kemampuan terhambat oleh kurangnya jumlah Pegawai, kemudian, indikator finansial belum mencukupi serta indikator waktu pelaksanaan juga sudah sesuai dengan target yang diharapkan. *Ketiga*, dari sub variabel karakteristik agen pelaksana untuk indikator organisasi formal yang terlibat dalam program RS-RTLH ini yaitu pihak Kecamatan, desa dan Dinas Perkim-LH, indikator organisasi informal yang tidak ada dalam kegiatan implementasi ini. *Keempat*, dari sub variabel sikap kecenderungan para pelaksana untuk indikator sikap penerimaan dari masyarakat yang sangat baik dalam program RS-RTLH ini dan indikator tidak adanya sikap penolakan dari masyarakat terhadap program RS-RTLH. *Kelima*, dari sub variabel komunikasi antara organisasi dan aktivitas pelaksana dari indikator koordinasi komunikasi sudah berjalan dengan baik; dan *Keenam*, dari sub variabel lingkungan ekonomi, sosial dan politik untuk indikator lingkungan ekonomi yang sangat berdampak terhadap implementasi penanggulangan kemiskinan melalui program RS-RTLH, indikator lingkungan sosial juga memberikan dampak terhadap kegiatan RS-RTLH dan indikator lingkungan politik juga mempengaruhi dikarenakan pelaksanaan program ini disalurkan langsung dari pusat.

2. Faktor-faktor yang mempengaruhi *Pertama*, faktor pendukung yaitu tingkat realisasi kebijakan, pembangunan nasional pada bidang perumahan dan pemukiman, target tercapainya pelaksanaan, tingkat kesediaan masyarakat, memperbaiki kondisi tempat tinggal masyarakat setempat, upaya-upaya pertemuan, pembagian tugas, masyarakat setempat juga ikut membantu dalam pembangunan rumah yang mendapat bantuan RS-RTLH dan adanya dukungan dari pihak DPRD. *Kedua*, faktor penghambat yang terdiri dari kurangnya jumlah sumber daya manusia dari Dinas Perkim-LH, dana yang tidak mencukupi, tidak adanya keterlibatan organisasi informal dalam kegiatan implementasi program RS-RTLH dan tingkat pendapatan masyarakat yang ada di desa Harusan Telaga umumnya rendah.
3. Upaya-upaya yang sudah dilakukan dengan mengajukan proposal pengajuan penambahan karyawan, mengajukan penambahan dana, mengikut sertakan organisasi informal dalam kegiatan program RS-RTLH dan melakukan pelatihan keterampilan usaha ekonomi.

## DAFTAR PUSTAKA

- Agustino, leo 2012. *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*. Alfabeta : Bandung.
- Anggara, Sahya. 2012. *Metode Penelitian Administrasi*. Bandung: CV Pustaka Setia.
- Anonim 2016. *Analisis Kebijakan Dari Formulasi ke Penyusunan Model-Model Implementasi Kebijakan Publik*. Jakarta : PT. Bumi Aksara.
- Anonim. 2017. *Dasar Hukum dan Panduan Kriteria Ratilahu*. Jakarta: Indonesia.
- Anonim. 2020. *Pedoman Penyusunan dan Penulisan Skripsi*. Amuntai: Tidak diterbitkan.
- Anonim. *Peraturan Menteri Sosial Nomor 20 Tahun 2017 tentang Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni*. Indonesia: Jakarta.
- Rismana, Daud. 2019. *Implementasi Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2018 tentang Program Keluarga Harapan (PKH)*. Semarang: Tidak diterbitkan.
- Fadlurrohim, Ishak. 2019. *Implementasi Program Bantuan Pangan Non Tunai (Studi Kasus di Kota Cimahi)*. Cimahi: Tidak diterbitkan.
- Kartiwi, Asep. 2015. *Metode penelitian Administrasi*. Bandung : CV. Pustaka Setia.
- Witaradya, Kertya. 2017. *Governance Consultant*. Jakarta: Indonesia.
- Kuswana, Dadang. 2011. *Metode Penelitian Sosial*. Bandung : CV. Pustaka Setia.
- Pradoko, Susilo. 2015. *Paradigma Metode Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Unipress.
- Rahmatullah. 2018. *Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 33 Tahun 2011 Tentang Pajak Sarang Burung Walet Kecamatan Amuntai Selatan Kabupaten Hulu Sungai Utara*. Amuntai: Tidak diterbitkan.
- Rusli, Budiman. 2013. *Kebijakan Publik Membangun Pelayanan Publik yang Responsif*. Bandung: Hakim Publishing.
- Santosa, Pandji. 2012. *Administrasi Publik Teori dan Aplikasi Good Governance*. Bandung : PT. Refika Aditama.
- Siahaan, Marihot Pahala. 2016. *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*. Edisi Revisi. Jakarta :Rajawali Pers.
- Sugiyono. 2014. *Metodologi Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfa Beta.
- Sujarweni,V.Wiratna. 2014. *Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: Pustaka Baru Pers.

Suparno. 2017. *Implementasi Kebijakan Publik dalam Praktek*. Sidoarjo: Dwiputra Pustaka Jaya.  
Taufiqurakhman. 2014. *Kebijakan Publik*. Jakarta :Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik.